

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang pembagian kewenangan urusan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tentang penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan dan sumber daya mineral, sedangkan urusan pendidikan, pengelolaan pendidikan menengah dan khususnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Pada prinsipnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 ini mengubah sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat.

Daerah-daerah di Indonesia diberikan kewenangan yang lebih luas dan nyata dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya. Hal ini berdampak tumbuhnya kreatifitas di daerah-daerah untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusianya, sehingga dengan adanya daerah otonom ini diharapkan dapat menghasilkan pembangunan daerah yang berkualitas dan merata. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuannya merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan daerah dapat disesuaikan

oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Setiap daerah otonom diberikan kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah dalam menjalankan rumah tangganya masing-masing dengan cara mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut agar menghasilkan pendapatan daerah yang akan berguna untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Sumber-sumber penerimaan daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Kemudian Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber PAD terdiri dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di provinsi Sumatera Barat yang sedang melakukan pembangunan ekonomi secara bertahap dan terencana. Sebagai daerah otonomi Kabupaten Sijunjung juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya (PAD) untuk meningkatkan perekonomian daerahnya. Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam meningkatkan PAD adalah melalui pemungutan pajak daerah melalui berbagai sumber. Dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sama halnya dengan

potensi daerah, pengoptimalan dalam pengelolaan potensi tersebut oleh pemerintah daerah akan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 peraturan daerah Kabupaten Sijunjung mendefenisikan jenis pajak daerah yang dipungut antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan yang terakhir bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), realisasi penerimaan pajak daerah kabupaten sijunjung pada tahun 2003 sebesar Rp 272,22 dengan persentase sebesar 1,5% dan terus berfluktuasi sampai tahun 2014 sebesar Rp 7.839,20 dengan persentase sebesar 4,7%. Realisasi penerimaan pajak daerah tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp 7.839,20 dan yang terendah terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp 193,30 dengan persentase sebesar 2,1%.

Tingginya penerimaan pajak daerah Kabupaten Sijunjung diperkirakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain PDRB dan jumlah penduduk. PDRB memberikan gambaran kinerja pembangunan ekonomi dari waktu ke waktu sehingga arah perekonomian daerah akan lebih jelas. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui laju kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) dan PDRB. untuk kenaikan PDRB diukur dengan cara

mengurangi PDRB tahun ini dengan tahun sebelumnya. Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan PDRB. Semakin tinggi nilai kenaikan PDRB suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2001).

Data BPS menunjukkan PDRB Kabupaten Sijunjung pada tahun 2003 yaitu 919.081,38 juta rupiah. PDRB Kabupaten Sijunjung terus meningkat sampai tahun 2014 yaitu sebesar 5.239.490,24 juta rupiah dengan laju pertumbuhan sebesar 5,2%. PDRB tertinggi yaitu pada tahun 2014 senilai 5.239.490,24 juta rupiah dengan laju pertumbuhan 5,2% dan terendah yaitu pada tahun 2003 senilai 919.081,38 juta rupiah dengan rata rata pertumbuhan 6,1%. Secara keseluruhan dari tahun ke tahun tampak mengalami kenaikan. Pertumbuhan PDRB yang tinggi ini diharapkan akan berdampak pada penerimaan pajak.

Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan PAD. Seperti halnya yang telah dilakukan penelitian oleh Norfridwitya (2006) yang menjelaskan pertumbuhan penduduk, besar kecilnya pendapatan di pengaruhi oleh jumlah penduduk. Apabila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang di terima akan meningkat karena adanya jumlah penduduk yang produktif didalam perekonomian.

Meningkatnya aktifitas pelaku ekonomi tentu harus diimbangi dengan fasilitas atau sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah. Sehingga

pemerintah mengeluarkan anggarannya dalam belanja daerah atau konsumsi pemerintah. Pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penyediaan fasilitas publik tentu tidak dapat berpengaruh langsung pada saat itu juga melainkan pada tahun sesudahnya. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut bertujuan untuk meningkatkan produktifitas para pelaku ekonomi. Dengan meningkatnya produktifitas para pelaku ekonomi akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sijunjung. Hal tersebut juga akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak daerah karena kemampuan masyarakat dalam membayar pajak meningkat.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memicu perkembangan perekonomian. Angkatan kerja yang tumbuh sangat cepat tentu saja akan membawa beban tersendiri bagi perekonomian, yakni penciptaan atau perluasan lapangan kerja, jumlah tenaga produktif. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi (Sukirno, 2011).

Data BPS menunjukkan Jumlah Penduduk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2003 sebanyak 181.365 jiwa dan pada tahun 2014 sebanyak 218.588. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung berfluktuasi walaupun pada tahun 2010 mengalami penurunan sebanyak 202.601 tetapi penurunan tersebut tidak terlalu signifikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung mengalami kenaikan dengan upaya pemerintah daerah yang

mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian, karena jumlah penduduk yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Jumlah Penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan permasalahan mendasar yang bisa berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pertumbuhan penduduk harus ditingkatkan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh langsung dari PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Pengaruh PDRB Dan Jumlah Penduduk Pajak Daerah Di Kabupaten Sijunjung”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung?

1.3 Tujuan Penelitian

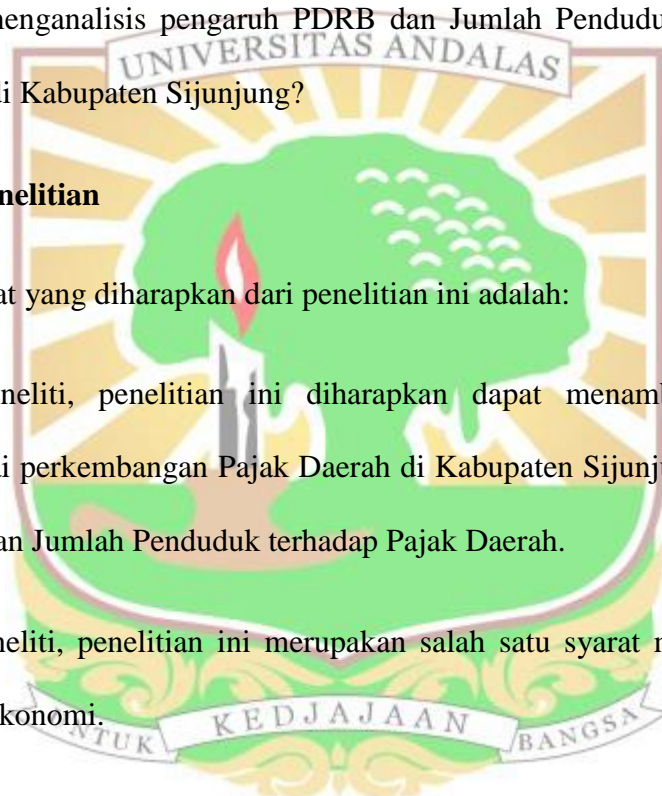
Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Perkembangan terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung?
2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai perkembangan Pajak Daerah di Kabupaten Sijunjung dan pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap Pajak Daerah.
2. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana ekonomi.
3. Bagi Universitas, dapat dijadikan sumbangan keilmuan dan menambah daftar kepustakaan.
4. Bagi masyarakat, mahasiswa, maupun peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik terkait, dapat dijadikan sebagai rujukan serta tambahan informasi.



1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian akan dapat dilakukan secara terarah dan lebih fokus atas masalah yang diteliti, maka perlu adanya ruang lingkup penelitian, yaitu waktu penelitian (*time series*) yang digunakan dimulai dari tahun 2003-2014 dan daerah penelitian adalah Kabupaten Sijunjung. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah dan variabel independen dalam penelitian ini adalah PDRB dan Jumlah Penduduk.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI DAN TEMUAN EMPIRIS

Dalam bab ini menjelaskan teori penelitian, kerangka pemikiran konseptual dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan ruang lingkup penelitian, data dan sumber data, dan metode analisis data.



BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan bagaimana gambaran umum kondisi daerah dan penelitian dan kemudian menjelaskan bagaimana perkembangan Pajak Daerah, PDRB, dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Sijunjung.

BAB V : TEMUAN EMPIRIS DAN APLIKASI KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan hasil dari pembahasan dari analisa data yang telah diteliti serta merumuskan kebijakan apa saja yang perlu dan bisa dilakukan serta di ambil dalam penelitian ini.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan secara singkat dari penelitian dan saran untuk berbagai pihak.

